

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

By Irma Purnamasari

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Irma Purnamasari

4

Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, & Ilmu Komunikasi Universitas
Djuanda Bogor

4

ABSTRACT

The Development which is closing the needs of community is a demand on this autonomy era. However, many obstacles are found in every step of the executions, and one of them is planning. Ideally, the development planning should be participative and have orientation on the basic needs of the community. Sometimes these 2 things are abandoned due to following: (1) Lack of understanding on development planning from community and government officials; (2) The Community sometimes became pessimistic on the development planning as they ideas are difficult to be accommodated when it comes to higher process; (3) The Limitations of government officials and development agents (kader) which duty is to communicate the development planning to the community; (4) The Period of development planning is very short and very imbalance with the materials that need to be discussed and decided.

22

Key words: Participation, Planning, Development.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan pembangunan masyarakat sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat dalam segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan, karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya dan merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Proses perencanaan partisipatif dapat dimulai dengan informasi tentang ketersediaan

sumber daya dan arah pembangunan daerah, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara input, proses dan output atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya, kemudian memperhatikan fokus perencanaan pada kepentingan masyarakat, partisipasi masyarakat, sinergitas perencanaan, dan legalitas perencanaan.

Partisipasi harus berdampak signifikan terhadap peningkatan

kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki atas pembangunan yang dilakukan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat akan mendukung sumber daya dengan sadar dan diakui. Dana APBD bisa disesuaikan atau ditambah melalui dana dari masyarakat lokal. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan serta **13** luasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat **13** menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

1.3. Tinjauan Pustaka

Partisipasi memang telah lama menjadi penghias bibir para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan

tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat menurut pejabat hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Tjokroamidjojo (1995) menyimpulkan bahwa pembangunan nasional merupakan: (1) Proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan itu

merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu.

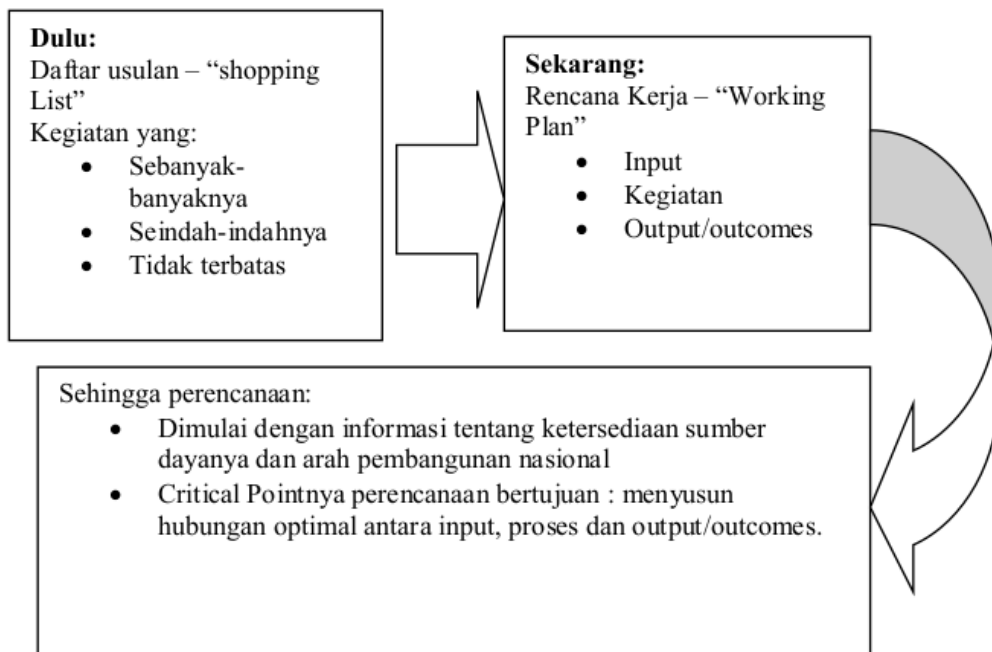
Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981) yang lebih lanjut mengemukakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.

3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

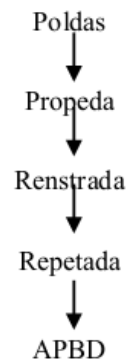
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada proses Perencanaan Pembangunan Daerah, Perubahan mendasar pada proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Perubahan Paradigma Perencanaan (BAPPENAS 2004)

Uraian tentang perubahan mendasar paradigma perencanaan di atas, intinya adalah proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang lama lebih menekankan daftar usulan dengan membuat “Shopping List” kegiatan sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya dan tidak terbatas, sehingga proses perencanaan pembangunan yang lama dianggap

hanya sesuai dengan keinginan bukan kebutuhan. Disamping itu proses perencanaan pembangunan sangat “powerfull” mulai dari perencanaan hingga penentuan anggaran, dengan kata lain proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara *Top Down* yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 2 Perencanaan Pembangunan Lama 2000-2004 (BAPPENAS 2004).

Dari Gambar 2 di atas, nampak bahwa proses perencanaan pembangunan sangat kental dengan nuansa *Top Down* karena semua dokumen perencanaan berasal dari pusat. Namun walaupun demikian masih dimungkinkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti yang terlihat dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) yang diadakan setiap tahun.

Proses perencanaan pembangunan sekarang lebih menekankan pada rencana kerja atau “working plan” sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas,

dan lain-lain; (2) kegiatan (proses); (3) output/outcomes.

Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan

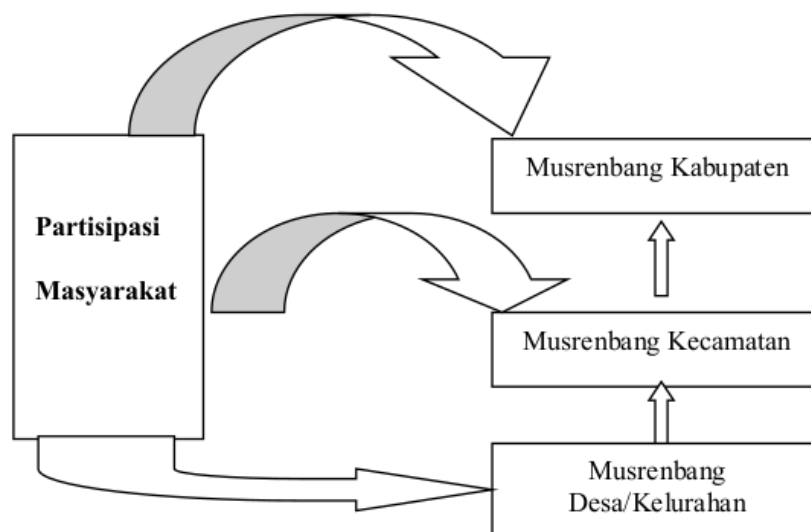
sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan

Sejalan dengan waktu, upaya memikirkan ulang format proses politik yang lebih memberi ruang kepada rakyat mulai tampak, salah satu wujudnya⁹ adalah dengan diterapkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang “Pedoman umum pengaturan mengenai desa” serta keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 2002 tentang “Peraturan desa dan keputusan kepala desa”. Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tersebut secara umum mengamanatkan bahwa pembangunan daerah dan desa harus dikelola dengan memperhatikan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, sekaligus dengan memelihara kehidupan berdemokrasi di tingkat desa dalam pelaksanaannya kemudian Undang-undang tersebut direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan untuk peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbit Surat Edaran Bersama antara Kepala BAPPEN¹⁵S dengan Medagri No. 0259/M. PPN/I/2005

/050/166/sj tanggal 20 Januari 2005 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005 dari tingkat desa hingga Kabupaten/Kota.⁸ Di tingkat Kabupaten terbit Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaporan Rencana Kerja Pemkab Sukabumi.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematis, yang tanggap terhadap perkembangan j¹⁶an, yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Adapun Model Sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4 berikut.



Gambar 3 Model Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi.

20

II. METODE PENELITIAN

2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut²¹ Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006)

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

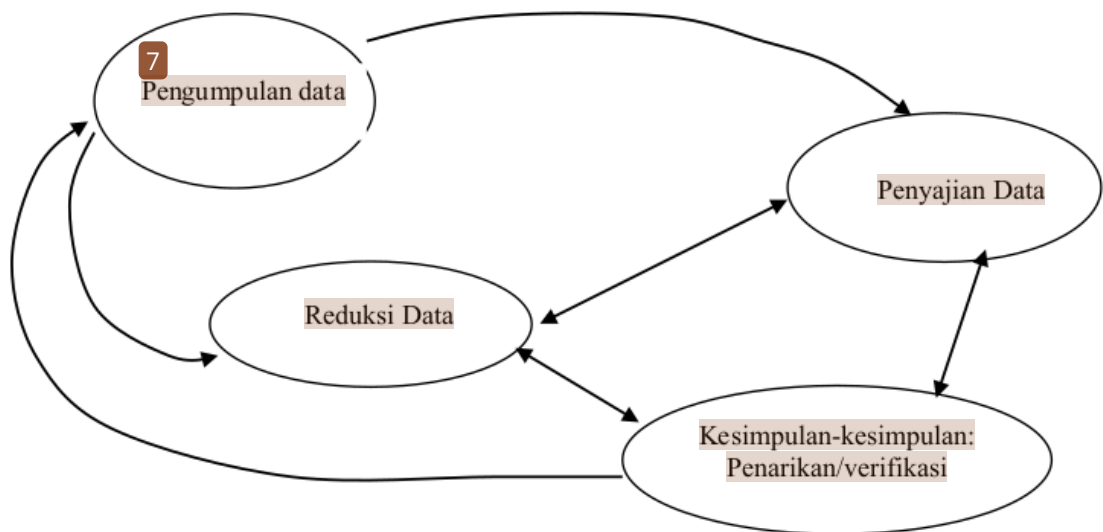
18

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meliputi wawancara⁶ semi struktur dan observasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan

dan mengganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman (1992).



Gambar 4 Analisis data model interaktif (Milles dan Huberman 1992).

Gambar 17 di atas memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linear. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian

2.3. Metode Analisis

Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap

reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

2. Tahap penyajian data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi data/ penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan

pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

19

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
 - a. Beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat Musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati.
 - b. Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke proses perencanaan pembangunan Kabupaten.
 - c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke

Kecamatan terpenuhi, meskipun untuk masing-masing desa, Warnajati, Sukasirna, Pamuruyan dan kelurahan Cibadak penetapan prioritas kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa beserta aparat dan LPMD tanpa melibatkan masyarakat, kecuali Desa Sekarwangi.

2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah, ini dilihat dari:

a. Fokus perencanaan, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT/RW belum dilakukan secara menyeluruh di 5 desa yaitu Desa Pamuruyan, Sekarwangi, Warnajati, Sukasirna dan Kelurahan Cibadak. Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar usulan prioritas kecamatan. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi

sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penyelidikan masalah dan kebutuhan di tingkat RT, sebagian besar melakukan proses penyelidikan tersebut di tingkat dusun dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

b. Partisipatoris, dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh waktu dan tempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat rendah dalam kegiatan penyelidikan masalah kebutuhan masyarakat tingkat RT. Masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan pemikiran baik dalam kegiatan penyelidikan tingkat RT maupun dalam musrenbang Desa dan Kecamatan, karena kegiatan tersebut dilakukan di tingkat dusun dimana hanya perwakilan masyarakat saja yang hadir. Di tingkat musrenbang Desa, hanya perwakilan masyarakat yang hadir yaitu para ketua RW,

Ketua organisasi masyarakat. Bila dilihat dari sisi peserta dalam proses perencanaan di tingkat Desa dan kecamatan belum mewakili unsur masyarakat, terlebih dalam proses perencanaan di tingkat Kecamatan, tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah. Masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, para elit desa dan kecamatan mendominasi pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi.

- c. Sinergitas Perencanaan yaitu proses perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak selalu menekankan kerja sama antar wilayah dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders. Hal ini dapat dilihat dari usulan desa dan SKPD bisa dikomunikasikan bersama-sama walaupun adakalanya tidak sinkron.
- d. Legalitas Perencanaan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, serta menjunjung etika dan tata nilai masyarakat. Unsur legalitas belum

dilakukan dengan baik kerana ada beberapa tahapan dalam petunjuk teknis musrenbang yang belum dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat Desa maupun Kecamatan.

5

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana: a) beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan, diantaranya tahapan persiapan dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang Kecamatan, seperti Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Sukasirna, dan Desa Warnajati; b) Di tingkat Musrenbang Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah, hal ini dapat dilihat dari: Pertama, fokus perencanaan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat, belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka; kedua, masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyumbangkan pemikiran dan masih terkendala waktu dan tempat, masyarakat belum dilibatkan dalam memutuskan kegiatan yang akan dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi; ketiga, unsur sinergitas sudah berjalan dengan baik; Keempat, unsur legalitas perencanaan belum dilaksanakan dengan baik, dimana perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cibadak kabupaten Sukabumi belum mengacu pada peraturan yang berlaku.

4.2. Saran

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.
2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan kegiatan

identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat.

3. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Perlu sosialisai yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa, Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Cibadak. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Referensi:

- Abe A. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta; Lapera Pustaka Utama.
- Abe A. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo; Penerbit Pondok Edukasi.
- Adi IR. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta; Lembaga Penelitian FE-UI.
- Conyers D. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Fitriastuti N. 2005. *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)*. [tesis]. Semarang; Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro.
- Hasibuan M. 1993. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta; CV. Haju Masagung.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta; Universitas Indonesia UI Press.
- Kartasmita G. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta; LP3ES.
- Moleong L. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosada Karya.
- Mubiyarto. 1984. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta, P3PK UGM.
- Mikkelsen B. 2006. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Michael T. 1977. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta; Erlangga.
- Muhadjir HN. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Rakesarasin.
- Milles MB, Hubberman AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Rohidi T, Mulyarto. Jakarta; UI Percetakan.
- Moelyarto T. 1999. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*. Yogyakarta; Kreasi Wacana.
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*. Bandung; Tarsito.
- Nazir M. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Riyadi, Bratakusumah DS. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- ReksoPutranto S. 1992. *Manajemen Proyek Pemberdayaan*. Jakarta; Lembaga Penerbitan FE-UI.
- Siagian SP. 1994. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta; Gunung Agung.
- Singarimbun M, Effendi S. 1986. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta; Suntingan LP3ES.
- Soemarmo. 2005. *Analisis Pelaksanaan Pendekatan*

- Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik). [tesis]. Semarang; Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro.
- Tjokroamidjojo B. 1995. *Maajemen Pembangunan*. Jakarta; Gunung Agung.
- Wijaya R. 2001. Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta). [tesis]. Yogyakarta; Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/sj tertanggal 20 Januari 2005 diatur petunjuk teknis Musrenbang.
- Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 Tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaporan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010

Daftar Bacaan

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	thedjavu1.blogspot.com Internet	77 words — 3%
2	123dok.com Internet	53 words — 2%
3	www.fppm.org Internet	42 words — 1%
4	content.co.id Internet	27 words — 1%
5	repository.unair.ac.id Internet	15 words — 1%
6	repository.upy.ac.id Internet	15 words — 1%
7	www.journalmabis.org Internet	15 words — 1%
8	desabalekambang.blogspot.com Internet	14 words — < 1%
9	thompaceh.blogspot.com Internet	14 words — < 1%
10	yustus09.blogspot.com Internet	

14 words — < 1%

11 ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com
Internet

13 words — < 1%

12 journal.unpas.ac.id
Internet

12 words — < 1%

13 khafidalwi.wordpress.com
Internet

12 words — < 1%

14 diploma4stan.wordpress.com
Internet

11 words — < 1%

15 ejournal.goacademica.com
Internet

11 words — < 1%

16 jurnal.minartis.com
Internet

11 words — < 1%

17 download.garuda.ristekdikti.go.id
Internet

10 words — < 1%

18 repository.umsu.ac.id
Internet

10 words — < 1%

19 repository.unja.ac.id
Internet

10 words — < 1%

20 ejournal.stipwunaraha.ac.id
Internet

9 words — < 1%

21 fr.scribd.com
Internet

8 words — < 1%

22 www.coursehero.com
Internet

8 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF